

20
24



GRAHA APARATUR
YERRY YANUAR

LAPORAN KEUANGAN 2024 (AUDITED)

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Ternate No. 2 Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan,
Kota Bandung. Telp. (022) 4203900 Website :
bkd.jabarprov.go.id, E-Mail : bkd@jabarprov.go.id

MERIT
SYSTEM
COE

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Kepegawaian Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2024 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

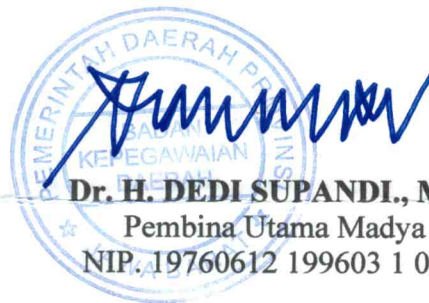
1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan

keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2024 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 23 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. DEDI SUPANDI., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19760612 199603 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran	xii
Neraca	xiii
Laporan Operasional	xiv
Laporan Perubahan Ekuitas	xv
Catatan atas Laporan Keuangan	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	3
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ...	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan	8
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	9
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	11
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	11
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	16
4.1 Entitas Akuntansi	16
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	17
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18

4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP	29
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	30
	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	30
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	30
5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	33
5.1.3	Catatan Penting Lainnya	53
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca.....	54
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	54
5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca.....	54
5.2.3	Catatan Penting Lainnya	66
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	67
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	67
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional	67
5.3.3	Catatan Penting Lainnya	78
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	79
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	80
5.4.3	Catatan Penting Lainnya	81
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD.....	82
BAB VII	PENUTUP	84

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	4	Rincian Persediaan
Lampiran	5	Persediaan
Lampiran	6	Mutasi Aset
Lampiran	7	Rincian Mutasi Aset
Lampiran	9	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	10	Penambahan Dan Pengurangan Daftar Aset Lainnya
Lampiran	10.1	Daftar Rincian Penambahan Dan Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran	10.2	Daftar Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Lampiran	11	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Lampiran	12	Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran	13	Pendapatan LO
Lampiran	14	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyisihan dan Beban Penyusutan
Lampiran	17	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA
Lampiran	20	Utang Belanja

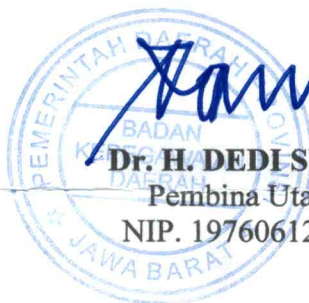
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 23 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. DEDI SUPANDI., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19760612 199603 1 005

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau sebesar 100 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 .

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 atau mencapai 100,00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.345.078.919,00 atau mencapai 96,61 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp83.161.090.935,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp74.029.219.974,00 atau 96,39 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp6.315.858.945,00 atau 99,27 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.000.000,00 dan Belanja sebesar Rp80.345.078.919,00 Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp80.342.078.919,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)		Tahun Anggaran 2023 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Pendapatan-LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	5.373.950,00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	5.373.950,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
Pendapatan Transfer-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja	83.161.090.935,00	80.345.078.919,00	73.993.330.116,00	72.429.597.869,00
Belanja Operasi	76.798.723.574,00	74.029.219.974,00	69.143.137.818,00	67.842.616.091,00
Belanja Pegawai	46.120.878.449,00	44.981.22.266,00	42.345.057.076,00	41.727.957.027,00
Belanja Barang dan Jasa	30.677.845.125,00	29.047.957.708,00	26.798.080.742,00	26.114.659.064,00
Belanja Modal	6.362.367.361,00	6.315.858.945,00	4.850.192.298,00	4.586.981.778,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.460.475.061,00	1.414.193.735,00	1.752.199.093,00	1.704.393.778,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.901.892.300,00	4.901.665.210,00	3.097.993.205,00	2.882.588.000,00
Surplus/(Defisit)-LRA	(83.158.090.935,00)	(80.342.078.919,00)	(73.990.580.116,00)	(72.424.223.919,00)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.841.243.174,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp71.086.200,00 , Aset Tetap sebesar Rp42.465.616.499,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp304.540.475,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp149.939.307,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp42.691.303.867,00 .

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	71.086.200,00	52.709.000,00
Aset Tetap	42.465.616.499,00	38.048.238.414,00
Aset Lainnya	304.540.475,00	304.540.475,00
Jumlah Aset	42.841.243.174,00	38.405.487.889,00
Kewajiban Jangka Pendek	149.939.307,00	209.055.620,00
Jumlah Kewajiban	149.939.307,00	209.055.620,00
Ekuitas	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	42.841.243.174,00	38.405.487.889,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Untuk Tahun Yang Berakhir S.D. 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023 dalam Tahun Anggaran 2024. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp62.578.000,00 , Beban Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.814.582.414,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp75.752.004.414,00) .

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Beban	75.814.582.414,00	69.691.304.531,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(75.752.004.414,00)	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	(69.626.352.581,00)
Surplus/(Defisit)-LO	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.196.432.269,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp75.752.004.414,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.342.078.919,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.594.000,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp55.594.000,00) , Ekuitas Tahun

Anggaran 2024 sebesar (Rp95.202.808,00), dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.691.303.867,00 .

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
Surplus/(Defisit)-LO	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)
RK PPKD	80.342.078.919,00	72.424.223.919,00
RA PPKD (Perolehan)	55.594.000,00	29.232.553.025,00
RA PPKD (Penyusutan)	(55.594.000,00)	(3.431.211.382,00)
Ekuitas	(95.202.808,00)	(23.766.906,00)
Ekuitas Akhir	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

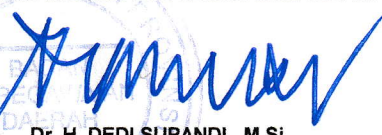
Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 31 Des 2024 (Audited)	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31 Des 2023 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3 * 100	7
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	5.373.950,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	2.750.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.950,00
4.2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Pajak (DBH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Pendapatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	5.373.950,00
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	76.798.723.574,00	74.029.219.974,00	(2.769.503.600,00)	96,39	67.842.616.091,00
5.1.01	Belanja Pegawai	46.120.878.449,00	44.981.262.266,00	(1.139.616.183,00)	97,53	41.727.957.027,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.677.845.125,00	29.047.957.708,00	(1.629.887.417,00)	94,69	26.114.659.064,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	6.362.367.361,00	6.315.858.945,00	(46.508.416,00)	99,27	4.586.981.778,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	1.460.475.061,00	1.414.193.735,00	(46.281.326,00)	96,83	1.704.393.778,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	4.901.892.300,00	4.901.665.210,00	(227.090,00)	100,00	2.882.588.000,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah Belanja	83.161.090.935,00	80.345.078.919,00	(2.816.012.016,00)	96,61	72.429.597.869,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	(83.158.090.935,00)	(80.342.078.919,00)	2.816.012.016,00		(72.424.223.919,00)
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(83.158.090.935,00)	(80.342.078.919,00)	2.816.012.016,00		(72.424.223.919,00)

Bandung, 23 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Dr. H. DEDI SUPANDI, M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Ref	2024 (Audited)	2023 (Audited)
1	2	3	4	5
1	ASET			
1.1	ASET LANCAR			
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
	Kas di BLUD		0,00	0,00
	Kas BOS		0,00	0,00
1.1.3	Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0,00	0,00
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa		0,00	0,00
1.1.10	Piutang Lain-lain		0,00	0,00
1.1.11	Penyisihan Piutang		0,00	0,00
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
1.1.13	Persediaan		71.086.200,00	52.709.000,00
	Jumlah Aset Lancar		71.086.200,00	52.709.000,00
1.2	ASET TETAP			
1.2.1	Tanah		29.003.280.000,00	29.003.280.000,00
1.2.2	Peralatan dan Mesin		27.838.041.383,00	26.269.156.341,00
1.2.3	Gedung dan Bangunan		13.787.440.915,00	8.931.579.615,00
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		205.841.367,00	205.841.367,00
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		200.106.055,00	144.512.055,00
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		-	-
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		(28.569.093.221,00)	(26.506.130.964,00)
	Jumlah Aset Tetap		42.465.616.499,00	38.048.238.414,00
1.3	ASET LAINNYA			
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang		-	-
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
1.3.3	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		-	-
1.3.4	Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa		-	-
1.3.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-
1.3.6	Aset Tidak Berwujud		145.500.000,00	145.500.000,00
1.3.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(145.500.000,00)	(145.500.000,00)
1.3.8	Aset Lain-lain		3.508.083.848,00	3.508.083.848,00
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(3.203.543.373,00)	(3.203.543.373,00)
	Jumlah Aset Lainnya		304.540.475,00	304.540.475,00
	JUMLAH ASET		42.841.243.174,00	38.405.487.889,00
2	KEWAJIBAN			
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	-
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka		114.191.166,00	173.769.167,00
2.1.3	Utang Belanja		35.748.141,00	35.286.453,00
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		149.939.307,00	209.055.620,00
	JUMLAH KEWAJIBAN		149.939.307,00	209.055.620,00
3	EKUITAS		42.691.303.867,00	38.196.432.269,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.841.243.174,00	38.405.487.889,00

Bandung, 23 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2024 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7 = (4/5)x100%
I	KEGIATAN OPERASIONAL					
I.1	PENDAPATAN	5.4.2.1				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.4.2.1.1				
	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.2.1.1.1	-	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.2.1.1.2	3.000.000,00	2.750.000,00	250.000,00	9,09
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	5.4.2.1.1.3	-	-	-	-
	Lain-lain PAD Yang sah	5.4.2.1.1.4	59.578.000,00	62.201.950,00	(2.623.950,00)	(4,22)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		62.578.000,00	64.951.950,00	(2.373.950,00)	(3,65)
I.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.2.1.2				
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.4.2.1.2.1				
	Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.2.1.2.1.1	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.2.1.2.1.2	-	-	-	-
	Dana Alokasi Umum	5.4.2.1.2.1.3	-	-	-	-
	Dana Alokasi Khusus	5.4.2.1.2.1.4	-	-	-	-
	Dana Penyesuaian	5.4.2.1.2.2.2	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		-	-	-	-
I.3	TRANSFER ANTAR DAERAH	5.4.2.1.2.2				
	Bantuan Keuangan	5.4.2.1.2.2.1	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Transfer		-	-	-	-
I.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.4.2.1.3				
	Pendapatan hibah	5.4.2.1.3.1	-	-	-	-
	Pendapatan Lainnya	5.4.2.1.3.2	-	-	-	-
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah		-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN		62.578.000,00	64.951.950,00	(2.373.950,00)	(3,65)
II	BEBAN					
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2				
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	44.981.262.166,00	41.720.418.467,00	3.260.843.699,00	7,82
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	2.533.005.157,00	3.945.354.478,00	(1.412.349.321,00)	(35,80)
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	17.328.600.557,00	12.074.082.122,00	5.254.518.435,00	43,52
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	1.931.730.559,00	1.375.732.662,00	555.997.897,00	40,41
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	7.100.278.833,00	8.808.980.963,00	(1.708.702.130,00)	(19,40)
	Beban Bunga	5.4.2.2.6	-	-	-	-
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7	-	-	-	-
	Beban Hibah	5.4.2.2.8	-	-	-	-
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9	-	-	-	-
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	1.912.165.449,00	1.666.478.049,00	245.687.400,00	14,74
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11	-	-	-	-
	Beban Transfer	5.4.2.2.12	-	-	-	-
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13	27.539.693,00	100.257.790,00	(72.718.097,00)	(72,53)
	Jumlah Beban Operasi		75.814.582.414,00	69.691.304.531,00	6.123.277.883,00	8,79
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)	(6.125.651.833,00)	8,80
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4				
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1				
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Surplus Non Operasional		-	-	-	-
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2				
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-	-	-
	Jumlah Defisit Non Operasional		-	-	-	-
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-	-	-
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)	(6.125.651.833,00)	8,80
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6				
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
III.2	BEBAN LUAR BIASA					
	Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	Jumlah Beban Luar Biasa		-	-	-	-
	POS LUAR BIASA		-	-	-	-
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)	(6.125.651.833,00)	8,80

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 23 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. DEDI SUPANDI, M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	AUDITED 2024	AUDITED 2023
EKUITAS AWAL	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)
RK PPKD	80.342.078.919,00	72.424.223.919,00
RK SKPD	-	-
RA PPKD (Nilai Perolehan)	55.594.000,00	29.232.553.025,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	(55.594.000,00)	(3.431.211.382,00)
RA. SKPD (Nilai Perolehan)	-	-
RA. SKPD (Akumulasi Penyusutan)	-	-
EKUITAS	(95.202.907,00)	(23.766.906,00)
KOREKSI SALDO AWAL KAS	-	-
KAS LAINNYA (BLUD)	-	-
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN	-	-
KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU	-	-
KOREKSI PIUTANG	-	-
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	-	-
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	1,00	(1.441.404,00)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-
KOREKSI INVESTASI PERMANEN	-	-
KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA	-	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA	-	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA	-	-
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR	-	-
EKUITAS - KOREKSI KDP	-	-
EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	-	-
KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP	-	-
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(95.202.808,00)	55.413.058,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-
KOREKSI NILAI ASET TAK BERWUJUD	-	-
KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN	-	-
KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-	-
KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	-	-
KOREKSI KEWAJIBAN	-	-
KOREKSI UTANG BELANJA	(100,00)	(7.538.560,00)
EKUITAS - PENGESAHAN PENDAPATAN BOS	-	-
KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	(70.200.000,00)
KOREKSI BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-	-
KOREKSI KAS BLUD	-	-
LAIN - LAIN	-	-
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR	-	-
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN	-	-
EKUITAS AKHIR	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00

Bandung, 23 Mei 2025
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT


Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Berbasis Akrual;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan kedelapan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2008 beralamat di Jalan Ternate No. 2 Telepon (022) 4235026, Faximile : (022) 4203960 Bandung – 40115.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi ;
- d. Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi
- e. Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; dan
- f. Penyelenggaran perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang kepegawaian berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

- 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Badan Kepegawaian Daerah adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah adalah Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	7
2	Program Kepegawaian Daerah	4
JUMLAH		11

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Badan Kepegawaian Daerah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah .

Strategi yang ditempuh oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah , Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Melakukan Integrasi data SIASN BKN dengan data pada SIAP Jabar
2. Melakukan Integrasi Seluruh Aplikasi Layanan Kepegawaian di Provinsi Jawa Barat
3. Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat melalui data hasil integrasi aplikasi SIAP Jabar dan SIASN
4. Melakukan mitigasi risiko terhadap penerapan keamanan informasi sesuai persyaratan hukum dan keterlibatan pihak ketiga
5. Membentuk Peraturan Daerah tentang Manajemen ASN untuk memayungi berbagai regulasi untuk implementasi manajemen talenta yang ada
6. Memenuhi dan melakukan pemeliharaan nilai pada aspek perencanaan kebutuhan dan aspek pengembangan karir dalam sistem merit
7. Melakukan penyusunan dan pengembangan penetapan SKJ bagi jabatan fungsional
8. Menyusun program pengembangan karir melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai yang terjadwal dan dilaksanakan secara berkelanjutan
9. Menyusun kebijakan coaching dan mentoring untuk peningkatan kompetensi pegawai
10. Membentuk Center of Excellence
11. Melakukan assessment tahap pertama jabatan administrator dan pengawas se-Jawa Barat
12. Membangun aplikasi SIM Jawara berbagi pakai
13. Melakukan kerja sama dengan pesantren yang ada di Jawa Barat untuk pembinaan kedisiplinan ASN
14. Mempersiapkan formulasi penilaian kinerja bulanan PPPK
15. Pembangunan fasilitas Assessment Center yang memadai, sesuai dengan standar penyelenggaraan penilaian kompetensi terakreditasi
16. Akselerasi penyelenggaraan pendidikan lanjutan melalui mekanisme tugas belajar dan izin belajar
17. Melakukan pendekatan melalui sosialisasi disiplin kepada ASN sebagai tindakan preventif
18. Melakukan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kiinerja Pegawai (SKP) melalui daring maupun luring;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Badan Kepegawaian Daerah dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor 12 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024;
7. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor 21 Tahun 2024 Tanggal 18 Oktober 2024.

2.5 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2024 - 2026 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target
1.	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Sistem Merit	397,5
2.	Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral, dan Berkinerja Tinggi.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	54,69

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Badan Kepegawaian Daerah akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2019 - 2024, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00 .

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 , terdiri dari:
 1. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 .
- b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00
- c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.373.950,00
	- Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.750.000,00
2	Pendapatan Transfer – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.373.950,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023, berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun anggaran 2024 meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 9,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00 .

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.345.078.919,00 atau 96,61 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp83.161.090.935,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp74.029.219.974,00 atau 96,39 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp76.798.723.574,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp44.981.262.266,00 atau 97,53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp46.120.878.449,00 ;
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp29.047.957.708,00 atau 94,69 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp30.677.845.125,00 ;
- b. Belanja Modal sebesar Rp6.315.858.945,00 atau 99,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp6.362.367.361,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.414.193.735,00 atau 96,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.460.475.061,00 .
 2. Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.901.665.210,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.901.892.300,00 .

c. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

d. Belanja Transfer sebesar atau persen dari yang dianggarkan sebesar

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$	6
1	Belanja Operasi	76.798.723.574,00	74.029.219.974,00	96,39	67.842.616.091,00
	- Belanja Pegawai	46.120.878.449,00	44.981.262.266,00	97,53	41.727.957.027,00
	- Belanja Barang & jasa	30.677.845.125,00	29.047.957.708,00	94,69	26.114.659.064,00
2	Belanja Modal	6.362.367.361,00	6.315.858.945,00	99,27	4.586.981.778,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	1.460.475.061,00	1.414.193.735,00	96,83	1.704.393.778,00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	4.901.892.300,00	4.901.665.210,00	100,00	2.882.588.000,00
3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		83.161.090.935,00	80.345.078.919,00	96,61	72.429.597.869,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.993.330.116,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp6.351.748.803,00 atau 8,58 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2024 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai surat Kemenpan RB kebijakan penataan dan penyelesaian tenaga honorer Tahun 2024 untuk instansi Pemerintah Daerah, namun pada pelaksanaan alokasi kebutuhan yang diperkirakan jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi tidak sesuai anggaran yang disediakan, maka

berimplikasi pada belanja sewa untuk seleksi kompetensi yang semula dianggarkan untuk selama 17 hari, menjadi 14 hari pelaksanaan.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2024 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp80.342.078.919,00).

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pendapatan-LO

Realisasi Pendapatan-LO pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.000.000,00 yang semuanya merupakan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 .
- Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp3.000.000,00 .
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp0,00 .

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp73.922.376.989,00 . Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Beban Pegawai	44.981.262.266,00	41.720.418.467,00
Beban Persediaan	2.533.005.157,00	3.945.354.478,00
Beban Jasa	17.328.600.557,00	12.074.082.122,00
Beban Pemeliharaan	1.931.730.559,00	1.375.732.662,00
Beban Perjalanan Dinas	7.100.278.833,00	8.808.980.963,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	1.666.478.049,00
Beban Lain-lain	27.539.693,00	100.257.790,00
Jumlah	75.814.582.414,00	69.691.304.531,00

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar 100,00 persen.

Persentase Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar 100,00 persen. Pencapaian anggaran tersebut sudah tercapai , hal ini disebabkan karena realisasi telah dilaksanakan sesuai target pendapatan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Badan Kepegawaian Daerah beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas akuntansi pada Badan Kepegawaian Daerah mencakup:

No	Bidang	Jumlah Subbag
1	Kepala Badan	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	-
4	Bidang Mutasi dan Promosi	-
5	Bidang Pengembangan Aparatur	-
6	Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	-
Jumlah Subbag		1 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Pengurus Barang	1 Orang
2	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		3 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah .

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah . Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Badan Kepegawaian Daerah .

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah . Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Badan Kepegawaian Daerah .

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Badan Kepegawaian Daerah atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;

- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau

entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan,

sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa*

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan

(KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam **Aset Lain-lain**. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai **Kewajiban Jangka Panjang** jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 .

Realisasi Pendapatan - LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00 . Hal ini berarti realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 meningkat sebesar Rp250.000,00 dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 ,Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp0,00 , Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA sebesar Rp0,00 . Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 , terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 ;

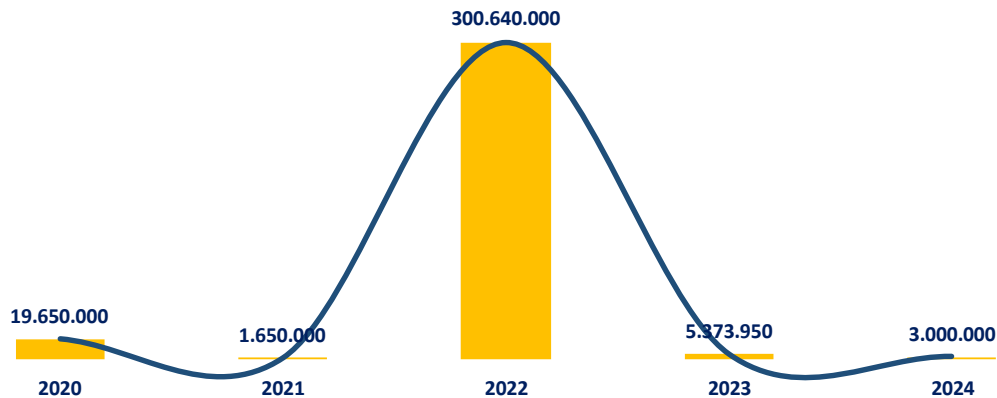
Realisasi Pendapatan Transfer-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Trend realisasi Pendapatan selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2020 s.d 2024

Dalam Jutaan Rupiah



Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.345.078.919,00 atau 96,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp83.161.090.935,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp74.029.219.974,00 Belanja Modal sebesar Rp6.315.858.945,00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp74.029.219.974,00 atau 96,39 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp76.798.723.574,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp44.981.262.266,00 atau 97,53 dari yang dianggarkan sebesar Rp46.120.878.449,00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp29.047.957.708,00 atau 94,69 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp30.677.845.125,00 ;

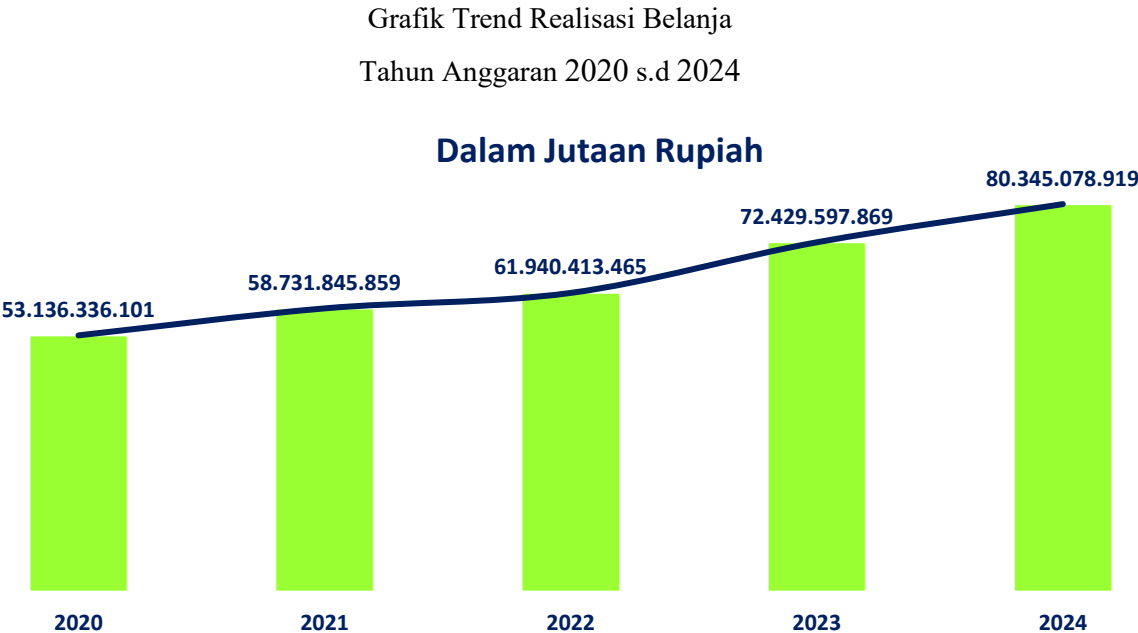
Belanja Modal sebesar Rp6.315.858.945,00 atau 99,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp6.362.367.361,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.414.193.735,00 atau 96,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.460.475.061,00 ;
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.901.665.210,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.901.892.300,00 ;

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Belanja Transfer sebesar Rp0,00 atau 0,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi Belanja sebesar Rp80.345.078.919,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp80.342.078.919,00).

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00 , berarti realisasi Pendapatan-LRA meningkat dibanding Tahun Anggaran 2023 sebesar 9,09 persen atau sebesar Rp250.000,00 .

Realisasi pendapatan pada tahun 2024 tercapai sebesar 100,00 persen, disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu realisasi telah dilaksanakan sesuai target pendapatan.

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.750.000,00 , berarti realisasi PAD-LRA meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 0,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi PAD-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 terdiri dari:

- a. Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 ;

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00 .

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

Pencapaian realisasi Pendapatan Retribusi - LRA tercapai 100,00 persen dari pagu disebabkan realisasi telah dilaksanakan sesuai target pendapatan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp2.750.000,00 berarti Pendapatan Retribusi Daerah-LRA meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 9,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Pendapatan Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha	3.000.000,00	2.750.000,00	9,09
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.000.000,00	2.750.000,00	9,09

Pertumbuhan realisasi Pendapatan Retribusi - LRA meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 9,09 persen dibanding Tahun Anggaran 2023, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu: adanya penambahan masa sewa yang semula 11 bulan menjadi 12 bulan.

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.623.950,00, berarti realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dibanding Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar (2.623.950,00) atau -100 persen.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam Rp):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan – LRA	0,00	2.623.950,00	-100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
4	Jasa Giro - LRA	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LRA	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bunga – LRA	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LRA	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
9	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LRA	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LRA	0,00	0,00	0,00
13	Pendapatan Dari Pengembalian – LRA	0,00	0,00	0,00
14	Pendapatan BLUD – LRA	0,00	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LRA	0,00	0,00	0,00
16	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LRA	0,00	0,00	0,00
17	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) – LRA	0,00	0,00	0,00
18	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan - LRA	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.1 Pendapatan Transfer-LRA

Realisasi Pendapatan Transfer – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.1.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak – LRA

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) – LRA

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.2.1.1 Dana Alokasi Umum – LRA

Realisasi Dana Alokasi Umum – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.2.1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar 0,00.

5.1.2.1.2.1.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

5.1.2.1.2.1.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar RpRp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA

Realisasi Transfer Antar Daerah – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.0,00

5.1.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.3.1 Pendapatan Hibah – LRA

Realisasi Pendapatan Hibah – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.1.3.1 Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan – LRA

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp80.345.078.919,00 atau 96,61 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp83.161.090.935,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 96,61 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sesuai surat Kemenpan RB kebijakan penataan dan penyelesaian tenaga honorer Tahun 2024 untuk instansi Pemerintah Daerah, namun pada pelaksanaan alokasi kebutuhan yang diperkirakan jumlah peserta yang lulus seleksi administrasi tidak sesuai anggaran yang disediakan, maka berimplikasi pada belanja sewa sewa untuk seleksi kompetensi yang semula dianggarkan untuk selama 17 hari, menjadi 14 hari pelaksanaan.

Realisasi Belanja sebesar Rp80.345.078.919,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp74.029.219.974,00 , Belanja Modal sebesar Rp6.315.858.945,00 , Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp73.993.330.116,00 , berarti realisasi Belanja meningkat sebesar Rp6.351.748.803,00 atau 8,58 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

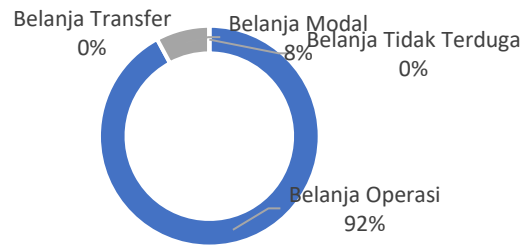
Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2024 meningkat dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu adanya pembangunan Grha Merit- Centre of Excellence for Merit System & Assesment Center yang berlokasi di Jl. Tubagus ismail No. 1A, Kota Bandung.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2024

Komposisi Belanja



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar Rp. 74.029.219.974,00 atau 92 persen dari Total Belanja.

5.1.2.2.1 Belanja Operasi

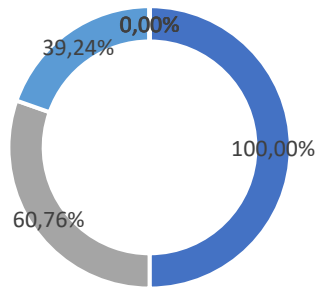
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp74.029.219.974,00 atau 96,39 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp76.798.723.574,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp44.981.262.266,00 , Belanja Barang dan jasa sebesar Rp29.047.957.708,00 , Belanja Bunga sebesar Rp0,00 , Belanja Subsidi sebesar Rp0,00 , Belanja Hibah sebesar Rp0,00 , dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Belanja Operasi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

Komposisi Belanja Operasi



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar 60,76 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp44.981.262.266,00 atau 97,53 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp46.120.878.449,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Belanja pegawai bersifat penyediaan untuk mengakomodir pegawai yang mengalami mutasi masuk atau keluar sehingga menyebabkan anggaran tidak sepenuhnya direalisasikan;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja tidak direalisasikan sepenuhnya, jumlah tim yang mendapatkan insentif prestasi kerja dibawah target karena tim tidak memenuhi syarat mendapatkan insentif Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.422.108.801,00	10.147.314.310,00	97,36
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.175.195.126,00	7.053.837.200,00	98,31
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	766.910.554,00	746.887.736,00	97,39
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.076.200,00	141.260.000,00	98,73
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	833.624.200,00	816.226.000,00	97,91

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.875.200,00	135.210.000,00	98,07
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	426.524.826,00	415.183.860,00	97,34
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.357.430,00	16.177.291,00	98,90
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	99.080,00	90.641,00	91,48
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	813.249.330,00	765.127.572,00	94,08
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.432.362,00	14.328.507,00	92,85
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	46.266.180,00	42.985.503,00	92,91
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	47.498.313,00	0,00	0,00
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.698.769.648,00	34.833.947.956,00	97,58
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	27.147.484.564,00	26.801.129.054,00	98,72
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.615.614.584,00	4.528.103.152,00	98,10
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.935.670.500,00	3.504.715.750,00	89,05
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		46.120.878.449,00	44.981.262.266,00	97,53

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.345.057.076,00 , berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp2.636.205.190,00 atau 6,23 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2024 meningkat sebesar 6,23 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat penambahan pegawai dengan nominal belanja pegawai yang cukup signifikan
2. Realisasi belanja pegawai untuk kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN meningkat karena bertambahnya pegawai yang mendapatkan penghargaan Employee of The Month (EOTM)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.147.314.310,00	9.140.734.490,00	11,01
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.053.837.200,00	6.398.422.560,00	10,24
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	746.887.736,00	650.389.490,00	14,84
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	141.260.000,00	216.500.000,00	(34,75)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	816.226.000,00	452.434.000,00	80,41
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.210.000,00	187.745.000,00	(27,98)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	415.183.860,00	397.513.380,00	4,45
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.177.291,00	10.949.207,00	47,75
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.641,00	90.712,00	(0,08)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	765.127.572,00	774.121.368,00	(1,16)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.328.507,00	13.142.190,00	9,03
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	42.985.503,00	39.426.583,00	9,03
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.833.947.956,00	32.587.222.537,00	6,89
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	26.801.129.054,00	24.035.354.271,00	11,51
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.528.103.152,00	4.318.846.741,00	4,85
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.504.715.750,00	4.233.021.525,00	(17,21)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		44.981.262.266,00	41.727.957.027,00	7,80

Dari nilai belanja pegawai sebesar Rp44.981.262.266,00 , terdapat belanja pegawai BLUD sebesar Rp0,00

5.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.047.957.708,00 atau 94,69 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp30.677.845.125,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat belanja yang bersifat penyediaan seperti listrik, telepon dan biaya tetap lainnya;
2. Terdapat kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan menjadi tahun 2024 karena kebijakan dari instansi pembina terkait, diantaranya yaitu diklat dan sertifikasi jabatan fungsional.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	2.473.898.821,00	2.382.024.210,00	96,29
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.457.196.061,00	2.365.387.010,00	96,26
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	16.702.760,00	16.637.200,00	99,61
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.734.018.018,00	17.328.138.869,00	92,50
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.250.121.938,00	9.996.048.218,00	97,52
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	45.346.080,00	41.098.664,00	90,63
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.761.520.000,00	4.805.849.487,00	83,41
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	92.480.000,00	73.500.000,00	79,48
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	140.500.000,00	128.485.500,00	91,45
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.400.000,00	15.400.000,00	100,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.670.400.000,00	1.615.716.500,00	96,73
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	758.250.000,00	652.040.500,00	85,99
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.039.184.828,00	2.012.515.796,00	98,69
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	803.340.000,00	783.051.500,00	97,47
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.108.618.324,00	1.105.433.296,00	99,71
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.226.504,00	124.031.000,00	97,49
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.205.743.458,00	7.100.278.833,00	98,54
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.182.763.458,00	7.077.298.833,00	98,53
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	22.980.000,00	22.980.000,00	100,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		30.677.845.125,00	29.047.957.708,00	94,69

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.798.080.742,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa meningkat sebesar Rp2.249.876.966,00 atau 8,40 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu adanya peningkatan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	2.382.024.210,00	3.512.422.263,00	(32,18)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.365.387.010,00	3.512.422.263,00	(32,66)
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	16.637.200,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.328.138.869,00	12.043.425.676,00	43,88
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.996.048.218,00	8.903.303.317,00	12,27
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.098.664,00	40.250.959,00	2,11
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.805.849.487,00	1.317.995.000,00	264,63
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	73.500.000,00	91.500.000,00	(19,67)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	128.485.500,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.400.000,00	40.484.900,00	(61,96)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.615.716.500,00	963.250.000,00	67,74
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	652.040.500,00	686.641.500,00	(5,04)
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.012.515.796,00	1.277.642.662,00	57,52
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	178.817.250,00	(100,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	783.051.500,00	586.040.000,00	33,62
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.105.433.296,00	512.785.412,00	115,57
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.031.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.278.833,00	8.808.980.963,00	(19,40)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.077.298.833,00	8.727.242.363,00	(18,91)

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	22.980.000,00	81.738.600,00	(71,89)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	225.000.000,00	472.187.500,00	(52,35)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	225.000.000,00	447.187.500,00	(49,69)
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	25.000.000,00	(100,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	0,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		29.047.957.708,00	26.114.659.064,00	11,23

Dari nilai belanja barang dan jasa sebesar Rp29.047.957.708,00 , terdapat belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp0,00.

Dalam realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp29.047.957.708,00 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp0,00.

5.1.1.1.1.2 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.1.1.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.315.858.945,00 atau 99,27 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp6.362.367.361,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat anggaran yang bersifat penyediaan

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Tanah sebesar Rp0,00 , Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.414.193.735,00 , Belanja Gedung dan Bangunan sebesar

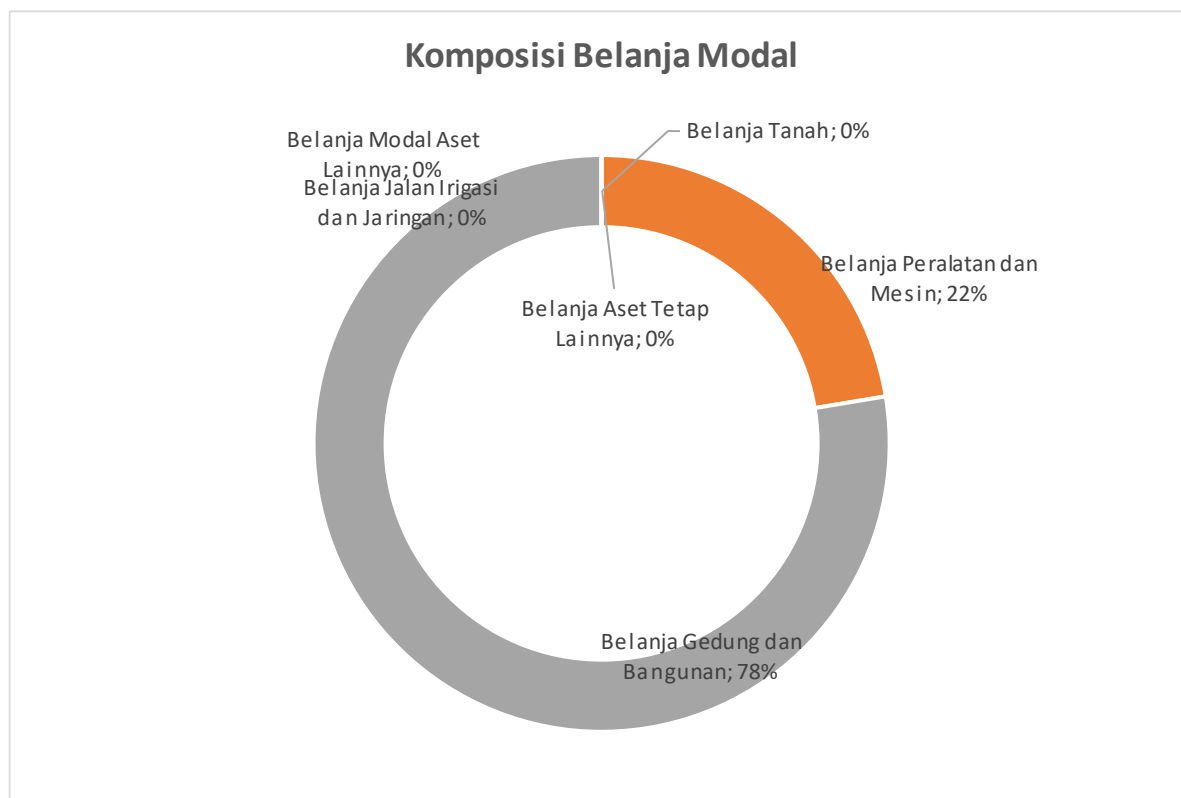
Rp4.901.665.210,00 , Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp0,00 , Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 , dan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.850.192.298,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 meningkat sebesar Rp1.465.666.647,00 atau 30,22 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu adanya pembangunan dan rehabilitasi gedung center of excelent untuk asessment center BKD

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Modal berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 78 persen dari Total Belanja Modal.

Dalam realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.315.858.945,00 terdapat realisasi Belanja Modal BOS sebesar Rp0,00.

5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.414.193.735,00 atau 96,83 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp1.460.475.061,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain terdapat belanja bersifat penyediaan.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.804.500,00	12.048.102,00	94,09
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	12.804.500,00	12.048.102,00	94,09
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	424.104.795,00	413.217.633,00	97,43
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	141.555.040,00	141.436.870,00	99,92
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	282.549.755,00	271.780.763,00	96,19
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	175.972.066,00	166.363.000,00	94,54
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	77.498.000,00	74.370.000,00	95,96
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	98.474.066,00	91.993.000,00	93,42
5.2.02.06.04		0,00	0,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	665.035.700,00	641.670.000,00	96,49
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	637.598.000,00	615.590.000,00	96,55
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	27.437.700,00	26.080.000,00	95,05
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	182.558.000,00	180.895.000,00	99,09
5.2.02.11.01	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	182.558.000,00	180.895.000,00	99,09
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.460.475.061,00	1.414.193.735,00	96,83

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.752.199.093,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar (Rp338.005.358,00)atau -19,29 persen dibanding Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.048.102,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	12.048.102,00	0,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	413.217.633,00	915.764.179,00	(54,88)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	141.436.870,00	26.498.250,00	433,76
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	271.780.763,00	815.015.929,00	(66,65)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	74.250.000,00	(100,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	166.363.000,00	535.778.000,00	(68,95)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	74.370.000,00	500.780.000,00	(85,15)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	91.993.000,00	34.998.000,00	162,85
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	641.670.000,00	183.076.999,00	250,49
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	615.590.000,00	170.176.998,00	261,74
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.080.000,00	12.900.001,00	102,17
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	180.895.000,00	69.774.600,00	159,26
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	180.895.000,00	69.774.600,00	159,26
5.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu - Rambu	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	0,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.414.193.735,00	1.704.393.778,00	(17,03)

5.1.2.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.901.665.210,00 atau 100,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.901.892.300,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain terdapat

belanja bersifat penyediaan dan akan direalisasikan pada tahun 2025.

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2024	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.846.317.300,00	4.846.317.300,00	100,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.846.317.300,00	4.846.317.300,00	100,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	55.575.000,00	55.347.910,00	99,59
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	55.575.000,00	55.347.910,00	99,59
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.901.892.300,00	4.901.665.210,00	100,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.097.993.205,00 , berarti realisasi Belanja Gedung dan Bangunan meningkat sebesar Rp1.803.672.005,00 atau 58,22 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 meningkat disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu terdapat belanja bersifat penyediaan.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	YoY %
1	2	3	4	5 = ((3-4)/4) x 100%
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.846.317.300,00	2.882.588.000,00	68,12
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.846.317.300,00	2.882.588.000,00	68,12
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	55.347.910,00	0,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	55.347.910,00	0,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.901.665.210,00	2.882.588.000,00	70,04

5.1.2.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.2.5 Belanja Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp80.342.078.919,00), dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan – LRA	3.000.000,00	5.373.950,00
Belanja - LRA	80.345.078.919,00	72.429.597.869,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	(80.342.078.919,00)	(72.424.223.919,00)

5.1.2.4.1 Pembiayaan Netto

Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00

5.1.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 , yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.4.1 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp0,00 yang berarti 0,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 .

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp80.342.078.919,00). Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	0,00	2.623.950,00
Penghematan Belanja	(2.816.012.016,00)	(1.563.732.247,00)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	(80.342.078.919,00)	(72.424.223.919,00)

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar (Rp80.342.078.919,00). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Surplus / Defisit–LRA sebesar (Rp80.342.078.919,00), Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar (Rp80.342.078.919,00) , dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan – LRA	3.000.000,00	5.373.950,00

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2024 (<i>Audited</i>)	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (<i>Audited</i>)
Belanja - LRA	80.345.078.919,00	72.429.597.869,00
Surplus / (Defisit) – LRA	(80.342.078.919,00)	(72.424.223.919,00)
Pembiayaan Netto	0,00	0,00
SILPA	(80.342.078.919,00)	(72.424.223.919,00)

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp80.342.078.919,00) .

CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Lancar	71.086.200,00	52.709.000,00
Aset Tetap	42.465.616.499,00	38.048.238.414,00
Aset Lainnya	304.540.475,00	304.540.475,00
Jumlah Aset	42.841.243.174,00	38.405.487.889,00
Kewajiban Jangka Pendek	149.939.307,00	209.055.620,00
Jumlah Kewajiban	149.939.307,00	209.055.620,00
Ekuitas	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00
Jumlah Ekuitas	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	42.841.243.174,00	38.405.487.889,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.841.243.174,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp71.086.200,00, Aset Tetap sebesar Rp42.465.616.499,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp304.540.475,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.939.307,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.691.303.867,00.

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.086.200,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00. Hal ini berarti aset lancar naik sebesar Rp18.377.200,00 atau 34,87 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Persediaan	71.086.200,00	52.709.000,00
Jumlah Aset Lancar	71.086.200,00	52.709.000,00

5.2.2.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

5.2.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.3 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.4 Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca.

Nilai Piutang Retribusi Daerah merupakan nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar (SKRKB) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 .

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.5 Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.6 Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.7 Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Bagian Lancar Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.8 Bagian Lancar Piutang Sewa

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.9 Piutang Lain-Lain

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.1.10 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.2.2.1.10.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah dilakukan agar piutang dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

5.2.2.1.10.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan agar piutang retribusi dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.2.2.1.10.3 Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilakukan agar Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.2.2.1.10.4 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya dilakukan agar Piutang Lainnya dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.2.2.1.11 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pembayaran yang sudah dilakukan namun manfaatnya belum dinikmati atau masih ada manfaatnya.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 . Hal ini berarti Beban Dibayar Dimuka tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.1.12 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp71.086.200,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.709.000,00 . Hal ini berarti persediaan naik sebesar Rp18.377.200,00 atau 34,87 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	71.086.200,00	52.709.000,00
Jumlah	71.086.200,00	52.709.000,00

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Barang Pakai Habis	71.086.200,00	52.709.000,00
Alat Tulis Kantor	27.132.700,00	24.324.000,00
Bahan Cetak	43.953.500,00	28.385.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	0,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH PERSEDIAAN	71.086.200,00	52.709.000,00

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
1.	Barang Pakai Habis		
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	71.086.200,00	52.709.000,00
2.	Barang Tak Habis Pakai		
3.	Barang Bekas Dipakai		
	Jumlah	71.086.200,00	52.709.000,00

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.465.616.499,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.048.238.414,00 . Hal ini berarti Aset Tetap naik sebesar Rp4.398.246.327,00 atau 11,56 persen. Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Tanah	29.003.280.000,00	29.003.280.000,00
Peralatan dan Mesin	27.838.041.383,00	26.269.156.341,00
Gedung dan Bangunan	13.787.440.915,00	8.931.579.615,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	205.841.367,00	205.841.367,00
Aset Tetap Lainnya	205.841.367,00	144.512.055,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(28.569.093.221,00)	(26.506.130.964,00)
Jumlah	42.465.616.499,00	38.048.238.414,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.003.280.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.003.280.000,00 . Hal ini berarti jumlah asset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.838.041.383,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.269.156.341. Hal ini berarti jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin naik sebesar Rp1.568.885.497,00 atau 1,06 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar					
1.1	Alat Bantu	39.820.000		5.000.000		44.820.000
2	Alat Angkutan					
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7.578.757.607	7.578.757.607			7.578.757.607
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
4	Alat Pertanian					
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga					
5.1	Alat Kantor.	3.359.176.804	3.359.176.804	688.792.455		4.047.969.259
5.2	Alat Rumah Tangga	3.929.969.955	3.919.688.854	206.822.263		4.136.792.218
5.3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	360.117.929				360.117.929
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar					
6.1	Alat Studio.	1.787.320.470	1.787.320.470	15.878.124		1.803.198.594
6.2	Alat Komunikasi	592.490.950	565.891.950		131.918.000	460.572.950
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan					
7.2	Alat Kesehatan Umum	68.596.000	68.596.000			68.596.000
8	Alat Per-senjataan					
8.1	Persenjataan Non Senjata Api	30.000.000	30.000.000			30.000.000
9	Komputer					
9.2	Komputer Unit	6.281.461.166	6.281.461.166	944.853.000		7.226.314.166
9.3	Peralatan Komputer	2.176.583.389	2.176.583.389		362.562.000	1.814.021.389
10	Alat Eksplorasi					
10.1	Alat Eksplorasi Geofisika	64.862.072	64.862.072	180.895.000		245.757.072
11	Peralatan Olah Raga					
	Peralatan Olahraga			13.524.200		13.524.200
Jumlah		26.269.156.341	26.269.156.341	2.063.365.042		27.838.041.383

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	26.269.156.341,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	1.541.791.242,00

)	
Kapitalisasi persediaan menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	27.093.800,00
Jumlah Penambahan	1.568.885.042,00
Pengurangan:	
Jumlah Pengurangan	
Jumlah Per 31 Des 2024	27.817.896.183,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.414.193.735,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2024 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	1.414.193.735,00
Jumlah Belanja		0,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.01	BM Tanah	
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	138.500.000
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.06	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Kodering	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.902.493,00.

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp 10.902.493,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal.

Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi mutase/hibah masuk dari kementerian.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp13.787.440.915,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.931.579.615,00. Hal ini berarti Gedung dan Bangunan naik sebesar Rp4.855.861.300,00 atau 54,37 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	8.931.579.615,00	8.931.579.615,00	4.994.361.300,00	138.500.000,00	13.787.440.915,00
Jumlah		8.931.579.615,00	8.931.579.615,00	4.994.361.300,00	138.500.000,00	13.787.440.915,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	8.931.579.615,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	4.846.317.300,00
Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	148.044.000,00
Jumlah Penambahan	4.994.361.300,00
Pengurangan:	
Jumlah Pengurangan	138.500.000,00
Jumlah Per 31 Desember 2024	13.787.440.915,00

(*) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Sebesar Rp4.901.665.210,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	4.901.665.210,00
Jumlah Belanja		4.901.665.210,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Gedung dan Bangunan, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun Anggaran 2024 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2024
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Peralatan dan Mesnin	138.500.000,00
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		138.500.000,00

5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .

6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp55.347.910,00.

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp55.347.910,00.

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp205.841.367,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp205.841.367,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibandingkan tahun 2023.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	205.841.367,00	205.841.367,00	0,00	0,00	205.841.367,00
Jumlah		205.841.367,00	205.841.367,00	0,00	0,00	205.841.367,00

5.2.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp200.106.055,00 , sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.512.055,00 .

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2023	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
				Tambah	Kurang	
1	Aset Tetap Lainnya	144.512.055,00	144.512.055,00	55.594.000,00	0,00	200.106.055,00
Jumlah		144.512.055,00	144.512.055,00	55.594.000,00	0,00	200.106.055,00

5.2.2.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Kontruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.2.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp28.569.093.221,00) sedangkan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp26.506.130.964,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti turun sebesar (Rp2.062.962.257,00) atau 1,07 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 sebesar (Rp28.569.093.221,00) dari Total Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp42.465.616.499,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2024 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	22.965.266.109,00	21.323.469.988,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.345.928.199,00	4.996.485.098,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.278.512,00	99.986.424,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	147.620.400,00	86.189.454,00
Jumlah	28.569.093.221	26.506.130.964,00

5.2.2.3 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp304.540.475,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp304.540.475,00 .

Aset Lainnya terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Tak Berwujud	145.500.000,00	145.500.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(145.500.000,00)	(145.500.000,00)
Aset Lain-Lain	3.508.083.848,00	3.508.083.848,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(3.203.543.373,00)	(3.203.543.373,00)
Jumlah	304.540.475,00	304.540.475,00

5.2.2.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.500.000,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp145.500.000,00 .

Rincian Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Software	145.500.000,00	145.500.000,00
Jumlah	145.500.000,00	145.500.000,00

5.2.2.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp145.500.000,00) sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp145.500.000,00) .

5.2.2.3.3 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.508.083.848,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.508.083.848,00 .

Aset Lain-lain terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Aset Tetap yang tidak digunakan untuk operasional pemerintahan, disebabkan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk dipergunakan (DIURAI JENIS ASETNYA)		
Aset Tetap dalam Pengajuan Penghapusan	3.508.083.848	3.508.083.848
Piutang Dalam Proses Penghapusan		
Jumlah		

5.2.2.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp3.203.543.373,00) sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp3.203.543.373,00) .

5.2.2.4 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.939.307,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 . Hal ini berarti turun sebesar Rp59.116.313,00 atau 0,72 persen.

Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp209.332.032,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp149.939.307,00 ,sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp209.055.620,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek menurun sebesar Rp59.116.313,00 atau 0,72 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	114.191.166,00	173.769.167,00
Utang Belanja	35.748.141,00	35.286.453,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	149.939.307,00	209.055.620,00

5.2.2.4.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan.

Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 .

5.2.2.4.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp114.191.166,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp173.769.167,00 .

5.2.2.4 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.748.141,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.286.453,00 . Hal ini berarti utang belanja tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp35.748.141,00 tersebut merupakan belanja listrik, air, dan telepon.

5.2.2.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 . Hal ini berarti Utang Jangka Pendek Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.691.303.867,00 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 . Hal ini berarti ekuitas naik sebesar Rp4.494.871.598,00 atau 11,17 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional tahun 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Beban	75.814.582.414,00	69.691.304.531,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)

Jumlah Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 yang semuanya merupakan Pendapatan Asli Daerah-LO, terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp0,00 , Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp3.000.000,00 , Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO sebesar Rp0,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp59.578.000,00 .

Jumlah Beban tahun 2024 sebesar Rp75.814.582.414,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp44.981.262.166,00 , Beban Persediaan sebesar Rp2.533.005.157,00 , Beban Jasa sebesar Rp17.328.600.557,00 , Beban Pemeliharaan sebesar Rp1.931.730.559,00 , Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp7.100.278.833,00 , Beban Subsidi sebesar Rp0,00 , Beban Hibah sebesar Rp0,00 , Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00 , Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.912.165.449,00 , Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp0,00 , Beban Transfer Rp0,00 dan Beban Lain-lain sebesar Rp27.539.693,00 . Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 , dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 . Pos Luar Biasa tahun 2024 sebesar Rp0,00 . Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp75.752.004.414,00) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar Rp62.578.000,00 dikurangi dengan Beban sebesar Rp75.814.582.414,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 .

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam

periode Tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi

Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Realisasi Pendapatan-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Pendapatan Asli Daerah-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LO	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 , realisasi Pendapatan-LO menurun dibanding tahun 2023 sebesar (Rp61.951.950,00) atau (95,38) persen.

5.3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp64.951.950,00 , berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO menurun sebesar (Rp61.951.950,00) atau (95,38) persen dibandingkan dengan tahun 2023.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	3.000.000,00	2.750.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	59.578.000,00	62.201.950,00
Jumlah	62.578.000,00	64.951.950,00

5.3.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Wajib Pajak belum memenuhi kewajibannya.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 atau - persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO adalah Pendapatan yang berasal dari Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp3.000.000,00 atau 1,00 persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp2.750.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2024 meningkat sebesar Rp250.000,00 atau 9,09persen .

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO menurut jenis retribusi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Retribusi Jasa Umum-LO	0,00	0,00
Retribusi Jasa Usaha-LO	3.000.000,00	2.750.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	0,00
Jumlah	3.000.000,00	2.750.000,00

5.3.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO adalah pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan BUMN.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp0,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan-LO tahun 2023 tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen.

5.3.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp59.578.000,00 atau - persen dari total Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2024 sebesar Rp62.578.000,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp62.201.950,00 , berarti realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO menurun sebesar (Rp2.623.950,00) atau (4,22) persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Pendapatan Transfer-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibandingkan dengan tahun 2023.

5.3.2.1.2.1 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak -LO tidak mengalami perubahan sebesar

Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.2 Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding Tahun 2023.

5.3.2.1.2.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 ,realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.5 Pendapatan Dana Penyesuaiaan-LO

Pendapatan Dana Penyesuaian-LO merupakan Dana Insentif Daerah dari Pemerintah Pusat. Realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Dana Penyesuaian -LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.6 Pendapatan Bantuan Keuangan-LO

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan -LO tidak mengalami perubahan sebesar

Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2024 sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.1 Pendapatan Hibah - LO

Realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Hibah-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.1.2.2 Pendapatan Lainnya - LO

Realisasi Pendapatan Lainnya-LO tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00 , realisasi Pendapatan Lainnya-LO tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Realisasi Beban tahun 2024 adalah sebesar Rp75.814.582.414,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pegawai	44.981.262.266,00	41.720.418.467,00
Beban Persediaan	2.533.005.157,00	3.945.354.478,00
Beban Jasa	17.328.600.557,00	12.074.082.122,00
Beban Pemeliharaan	1.931.730.559,00	1.375.732.662,00
Beban Perjalanan Dinas	7.100.278.833,00	8.808.980.963,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.912.165.449,00	1.666.478.049,00
Beban Lain-lain	27.539.693,00	100.257.790,00
Jumlah	75.814.582.414,00	69.691.304.531,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:

5.3.2.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp44.981.262.166,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai tahun 2023 sebesar Rp41.720.418.467,00 , maka realisasi beban pegawai meningkat sebesar Rp3.260.843.699,00 atau 7,82persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	10.147.314.210,00	9.133.195.930,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	34.833.947.956,00	32.587.222.537,00
Jumlah	44.981.262.166,00	41.720.418.467,00

5.3.2.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2024 adalah sebesar Rp2.533.005.157,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp3.945.354.478,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar menurun sebesar (Rp1.412.349.321,00)atau -64,20 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	2.308.005.157,00	3.498.166.978,00
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	225.000.000,00	447.187.500,00
Jumlah	2.533.005.157,00	3.945.354.478,00

5.3.2.2.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp17.328.600.557,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp12.074.082.122,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp5.254.333.159,00 atau 14,35persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Jasa Kantor	10.147.499.586,00	8.908.959.763,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.833.947.956,00	40.250.959,00
Beban Sewa Tanah	0,00	0,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.805.849.487,00	1.317.995.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	73.500.000,00	91.500.000,00

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	128.485.500,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	15.400.000,00	40.484.900,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	44.981.262.266,00	0,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.615.716.500,00	963.250.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	652.040.500,00	686.641.500,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.996.324.630,00	25.000.000,00
Jumlah	17.328.600.557,00	12.074.082.122,00

5.3.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.931.730.559,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp1.375.732.662,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan meningkat sebesar Rp555.997.897,00 atau 22,21persen dibanding tahun 2023.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	794.962.353,00	586.040.000,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.012.737.206,00	512.785.412,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	124.031.000,00	0,00
Beban Modal yang tidak dikapitalisasi yang merupakan pemeliharaan	0,00	98.090.000,00
Jumlah	1.931.730.559,00	1.375.732.662,00

5.3.2.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 adalah sebesar Rp7.100.278.833,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp8.808.980.963,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas menurun sebesar (Rp1.708.702.130,00)atau -19,40persen dibanding tahun 2023.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.077.298.833,00	8.727.242.363,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	22.980.000,00	81.738.600,00
Jumlah	7.100.278.833,00	0,00

5.3.2.2.6 Beban Subsidi

Realisasi Beban Subsidi tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Subsidi tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.2.7 Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Hibah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.2.8 Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Bantuan Sosial tidak mengalami perubahan sebesar tidak mengalami perubahan atau 0,00 persen dibanding tahun 2023.

5.3.2.2.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 adalah sebesar Rp1.912.165.449,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp1.666.478.049,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi naik sebesar (Rp245.687.400,00)atau 11,47 persen dibanding tahun 2023.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	1.546.593.314,00	1.531.010.746,00
2.	Gedung dan Bangunan	349.443.101,00	118.480.811,00
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.292.088,00	10.292.088,00
4.	Aset Tetap Lainnya	5.836.946,00	6.694.404,00
	Jumlah Beban Penyusutan	1.912.165.449,00	1.666.478.049,00
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
	Jumlah Beban Amortisasi	0,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.912.165.449,00	1.666.478.049,00

5.3.2.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyisihan Piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar tidak mengalami perubahan atau 0,00persen.

5.3.2.2.11 Beban Transfer

Realisasi Beban Transfer tahun 2024 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00 , berarti realisasi Beban Transfer tidak mengalami perubahan sebesar tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00persen dari tahun 2023.

5.3.2.2.12 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain tahun 2024 adalah sebesar Rp27.539.693,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp100.257.790,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain menurun sebesar (Rp72.718.097,00)atau -72,53persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	27.539.693,00	100.257.790,00
Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
Jumlah	27.539.693,00	100.257.790,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2023 adalah sebesar (Rp75.770.950.996,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Beban	75.833.528.996,00	69.691.304.531,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(75.770.950.996,00)	(69.626.352.581,00)

5.3.2.4 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 berasal dari Surplus Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Defisit Operasional sebesar Rp0,00 .

5.3.2.4.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00

5.3.2.4.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 direalisasikan sebesar Rp0,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional tahun 2024 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00 .

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Untuk tahun 2024 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi Surplus/(Defisit)-LO tahun 2024 sebesar (Rp75.770.950.996,00), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun 2024 (Audited)	Tahun 2023 (Audited)
Pendapatan-LO	62.578.000,00	64.951.950,00
Beban	75.833.528.996,00	69.691.304.531,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(75.770.950.996,00)	(69.626.352.581,00)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	(75.770.950.996,00)	(69.626.352.581,00)

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Ekuitas Awal	38.196.432.269,00	9.620.986.194,00
Surplus/(Defisit)-LO	(75.752.004.414,00)	(69.626.352.581,00)
RK PPKD	80.342.078.919,00	72.424.223.919,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	55.594.000,00	29.232.553.025,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	(55.594.000,00)	(3.431.211.382,00)
Ekuitas	(95.202.907,00)	(23.766.906,00)
Ekuitas Akhir	42.691.303.867,00	38.196.432.269,00

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.672.357.384,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.196.432.269,00 .
2. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp75.770.004.414,00).
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.342.078.919,00 .
4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp55.594.000,00.

5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp55.594.000,00)
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp95.202.907,00).
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.691.303.867,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.196.432.269,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2023 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.620.986.194,00 , berarti realisasi Ekuitas Awal meningkat sebesar Rp28.575.446.075,00 atau 297,01persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp75.752.004.414,00). Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp75.752.004.414,00). Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp69.626.352.581,00). Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 Surplus/(Defisit)-LO Badan Kepegawaian Daerah menurun sebesar (Rp6.125.651.833,00) atau 10,88 persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD). RK PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.342.078.919,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD). Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2024 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp55.594.000,00 serta Saldo RA PPKD

(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar (Rp55.594.000,00).

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2024 (<i>Audited</i>)	Tahun Anggaran 2023 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Diterima Dimuka		(1.441.404,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(95.202.907,00)	55.413.058,00
Koreksi Utang Belanja		(7.538.560,00)
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		(70.200.000,00)
Jumlah	(95.202.907,00)	(23.766.906,00)

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh Koreksi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena penggantian kode barang yang menyebabkan peubahan masa manfaat dan berdampak pada koreksi nilai akumulasi penyusutan.

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.691.303.867,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2024.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp38.196.432.269,00 , Ekuitas Akhir Badan Kepegawaian Daerah meningkat sebesar Rp4.494.871.598,00 atau 11,17 persen dibanding Tahun Anggaran 2024.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BPKAD

6.1 DOMISILI

Badan Kepegawaian Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 yang beralamat di Jalan Ternate Nomor 2, Kota Bandung

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah . Tugas pokok Badan Kepegawaian Daerah adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

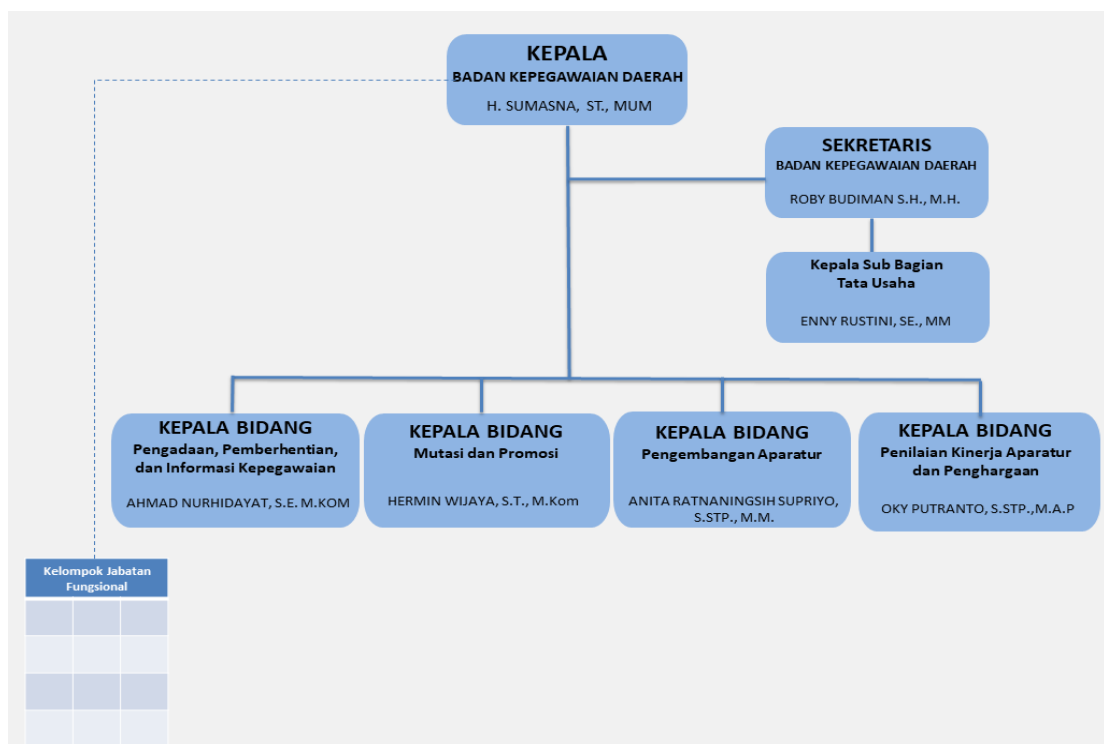
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- c. penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat



BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp42.841.243.174,00 Kewajiban sebesar Rp149.939.307,00 dan Ekuitas sebesar Rp42.691.303.867,00 ;
2. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp80.345.078.919,00 atau 96,61 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp83.161.090.935,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar (Rp80.342.078.919,00);
3. Pada Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp62.578.000,00 , Beban sebesar Rp75.814.582.414,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar (Rp75.752.004.414,00);
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.196.432.269,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp42.619.303.867,00 .

Bandung, 23 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. H. DEDI SUPANDI., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19760612 199603 1 005

LAMPIRAN

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Badan Kepegawaian Daerah per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp42.841.243.174,00 Kewajiban sebesar Rp149.939.307,00 dan Ekuitas sebesar Rp42.691.303.867,00 ;
2. Realisasi APBD Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah Rp3.000.000,00 atau 100,00 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp80.345.078.919,00 atau 96,61 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp83.161.090.935,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar (Rp80.342.078.919,00);
3. Pada Laporan Operasional Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat Pendapatan-LO sebesar Rp62.578.000,00 , Beban sebesar Rp75.814.582.414,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar (Rp75.752.004.414,00);
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.196.432.269,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp42.619.303.867,00 .

Bandung, 23 Mei 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. DEDI SUPANDI., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19760612 199603 1 005

LAMPIRAN

[illegible]

akun	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Unaudited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2024	Lebih / (kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Modified)
4	4.1.01.01.16	PNS Mobil Baring-Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.01.17	PNS Mobil Baring/Isolasi-Pick Up Box	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.01.18	PNS Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02	Ban Baku Kendaraan Bermotor (BBKMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.01	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.02	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.03	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.04	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.05	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.06	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.07	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.08	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.09	BBKMS Mobil Pemungut Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.10	BBKMS Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.11	BBKMS Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.12	BBKMS Kendaraan Bermotor yang Digunakan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.13	BBKMS Kendaraan Bermotor yang Digunakan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.14	BBKMS Mobil Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.15	BBKMS Mobil Pemungut Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.16	BBKMS Mobil Baring-Roda Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.17	BBKMS Mobil Baring/Isolasi-Pick Up Box	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.02.18	BBKMS Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.03	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.03.01	PBB Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.03.02	PBB Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.03.03	PBB Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.03.04	PBB Bumi dan Bangunan (PBB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.04	Pajak Air Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.05	Pajak Air Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.05.01	Pajak Air Perumahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.17	Pajak Aset Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.01.17.01	Pajak Aset Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02	Retribusi Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4	4.1.02.01	Retribusi Asas Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02	Retribusi Asas Usaha	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	100,00	2.750.000,00	2.750.000,00
4	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kelayakan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kependidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.10	Retribusi Penyelenggaraan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.11	Retribusi Penyelenggaraan di Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.12	Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.13	Retribusi Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Perawatan, dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.18	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Orang atau Barang dengan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.02.19	Retribusi Pelayanan Hasil Produk Usaha Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.03	Retribusi Perumahan Terbatas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan U	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usahat Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Ading (TKA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03	Hasil Pengalangan Kelayakan Daerah yang Digunakan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.01	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.01.01	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.01	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.01.0001	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.02	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.03	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.04	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.05	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.06	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.07	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.08	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.09	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.10	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.11	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.12	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.13	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.14	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.15	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.16	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.17	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.18	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.02.19	Bank Perumahan Bayat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.01	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.02	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.03	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.04	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.05	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.06	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.07	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.08	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.09	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.10	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.11	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.12	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.13	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.14	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.15	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.16	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.17	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.18	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.19	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1.03.03.20	Bagian laba yang digunakan kepada Pemerintah Daerah (Divide									

akun	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Unaudited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2024 (Kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)
4	4.3.01.04.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Selaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Selaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.02.01	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.02.01.01	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.01.02	Pendapatan atas Dana Bantuan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.01.03	Pendapatan atas Dana Bantuan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapital JIN pada RKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapital JIN pada RKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapital JIN pada RKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.03	Pendapatan Bagi Hasil Pemungutan IUPK atas Perambahan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.03.01	Pendapatan Bagi Hasil Pemungutan IUPK atas Perambahan Hutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.04	Kontribusi dari Sumber Lain yang Tidak Mengikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3.03.04.01	Kontribusi dari Sumber Lain yang Tidak Mengikat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	BELANJA DAERAH	83.161.090.915,00	80.345.078.915,00	979.800,00	979.800,00	-2.816.012.016,00	96,61	73.993.130.110,00	72.426.997.889,00
5	5.1	BELANJA OPERASI	75.798.723.574,00	74.029.219.974,00	979.800,00	979.800,00	-2.769.503.600,00	96,39	69.143.137.811,00	67.842.616.091,00
5	5.1.01	Belanja Pegawai	46.120.278.449,00	44.981.262.266,00	0,00	0,00	-1.139.016.183,00	97,53	42.345.957.076,00	41.727.957.076,00
5	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.420.108.801,00	10.147.314.310,00	0,00	0,00	-274.794.491,00	97,38	9.222.556.220,00	9.140.734.490,00
5	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.175.195.126,00	7.053.837.200,00	0,00	0,00	-121.357.926,00	98,31	6.438.699.260,00	6.398.422.560,00
5	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	786.510.554,00	746.887.736,00	0,00	0,00	-39.622.818,00	97,39	655.851.886,00	650.389.490,00
5	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.076.200,00	141.260.000,00	0,00	0,00	-1.816.200,00	98,75	221.600.000,00	216.500.000,00
5	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	833.624.200,00	816.216.000,00	0,00	0,00	-17.408.200,00	97,92	470.883.884,00	462.434.000,00
5	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.875.200,00	135.210.000,00	0,00	0,00	-2.665.200,00	98,14	190.940.000,00	187.745.000,00
5	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Bersas ASN	426.524.826,00	413.183.860,00	0,00	0,00	-13.340.966,00	97,75	399.861.141,00	387.453.000,00
5	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.357.430,00	15.177.251,00	0,00	0,00	-1.180.179,00	92,82	11.338.964,00	10.949.207,00
5	5.1.01.01.08	Belanja Pembinaan Gaji ASN	99.080,00	92.596,00	0,00	0,00	-6.484,00	93,46	92.596,00	90.712,00
5	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	833.249.330,00	785.127.572,00	0,00	0,00	-48.121.758,00	94,08	780.460.806,00	774.121.368,00
5	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.432.362,00	14.328.507,00	0,00	0,00	-1.103.855,00	92,85	13.279.413,00	13.142.190,00
5	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	46.246.180,00	42.985.503,00	0,00	0,00	-3.260.677,00	92,91	39.838.266,00	39.426.583,00
5	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Smpatan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat A	47.498.313,00	42.985.503,00	0,00	0,00	-4.512.810,00	90,30	39.838.266,00	39.426.583,00
5	5.1.01.01.13	Belanja Iuran Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.01.15	Belanja Zakat ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	35.698.749.648,00	34.833.947.956,00	0,00	0,00	-864.801.692,00	97,58	33.172.800.850,00	32.587.222.537,00
5	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	27.147.484.564,00	26.801.129.054,00	0,00	0,00	-346.355.510,00	98,72	24.222.944.361,00	24.035.954.271,00
5	5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	4.615.614.584,00	4.528.103.152,00	0,00	0,00	-87.511.432,00	98,10	4.377.306.536,00	4.318.846.741,00
5	5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	3.935.670.500,00	3.504.715.750,00	0,00	0,00	-430.954.750,00	89,05	4.523.398.951,00	4.233.021.525,00
5	5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.07	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.08	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.09	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.10	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.11	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.12	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.13	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.14	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.15	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.16	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.17	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.18	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.19	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.20	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.21	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.22	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.23	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.24	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.25	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.26	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.27	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.28	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.29	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.30	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.31	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.32	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.33	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.34	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.35	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.36	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.37	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.38	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.39	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.40	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.41	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.42	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.43	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.44	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.45	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.46	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.47	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.48	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.49	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.50	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.51	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.52	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.53	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.54	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.55	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.56	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.57	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.58	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.59	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.60	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.61	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.62	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.1.01.02.63	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	0,00	0,00						

[illegible]

Item	kode rekening	Nama Rekening	Anggaran 2024	Realisasi 31 Desember 2024 (Unaudited)	Debet	Kredit	Realisasi Setelah Koreksi Tahun 2024	Lebih / (kurang)	%	Anggaran Perubahan 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2023 (Audited)
6	6.2.04.07	Pembelian Peralatan dan Bangunan melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.04.07.01	Pembelian Peralatan dan Bangunan melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.01	Pengeluaran melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.01.01	Pengeluaran melalui BLUD-jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.01.02	Pengeluaran melalui BLUD-jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.01.03	Pengeluaran melalui BLUD-jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.02	Investasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6.2.05.02.01	Investasi Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SIPA	-83.156.090.955,00	-80.342.078.915,00	-979.800,00	-979.800,00	-80.342.078.915,00	2.816.012.015,00	96,61	-73.990.380.116,00	-77.424.223.919,00

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA
PERIODE 31 DESEMBER 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NO	Kode ring BDD	Nama Akun BDD	URAIAN	Nomor Perjanjian (Kontrak)	Tanggal Perjanjian (Kontrak)	Nilai Realisasi Belanja / Pengeluaran	Jangka Waktu (bulan)	Nilai Amortisasi per Bulan	Tahun awal perjanjian			Tahun berakhir perjanjian			Akumulasi Beban Amortisasi BDD sd 31 Des 2023	Akumulasi Beban Amortisasi BDD sd 31 Des 2024	BEBAN 1 Jan s.d. 31 Des 2024 (LO)	Beban Dibayar Dimuka Per 31 Des 2024 (Meraca)
									Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
a	Badan Kepegawaian Daerah																	
b																		
c																		
d																		
Jumlah																		
															0,00	0,00	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00	0,00
															-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL 2024 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31- Des-2024 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31-Des-2024 (Rp)	NILAI BUKU PER 31-Des-2024 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)			
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=(6-7)
1	TANAH	29.003.280.000,00	0,00	0,00	29.003.280.000,00	0,00	29.003.280.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	26.269.156.341,00	1.568.885.042,00	0,00	27.838.041.383,00	22.965.266.110,00	4.872.775.273,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.931.579.615,00	4.855.861.300,00	0,00	13.787.440.915,00	5.345.928.199,00	8.441.512.716,00
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	205.841.367,00	0,00	0,00	205.841.367,00	110.278.512,00	95.562.855,00
5	ASET TETAP LAINNYA	144.512.055,00	55.594.000,00	0,00	200.106.055,00	147.620.400,00	52.485.655,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	64.554.369.378,00	6.480.340.342,00	0,00	71.034.709.720,00	28.569.093.221,00	42.465.616.499,00

MENGETAHUI

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ENNY RUSTINI, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 DESEMBER 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	KETERANGAN	Saldo Awal 2024				Saldo Akhir per 31-Dec-2024										Hulu Baku Per 31-Dec-2024															
		1	2	3	4	Saldo Awal per 31-Dec-2024	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	YAHAM	26.000.000.000,00				26.000.000.000,00																									
2	PENGALIHAN DARI BERSIH	26.000.168.541,00			5.414.183.778,00	138.800.000,00	27.000.890,00																								
3	GEDUNG DARI BANGUNAN	8.551.878.815,00			4.001.886.215,00			136.600.000,00																							
4	JALAN BROSAM DAN JABINGAN	206.841.387,00																													
8	ASSET TETAP LAINNYA	144.813.688,00																													
8	KONTRAKSI DALAM PERUSAHAAN				0,00																										
Jumlah Asset Tetap		64.884.986.373,00			8.516.888.846,00	138.800.000,00	27.002.890,00	136.600.000,00																							
PERUSAHAAN																															
ASSET LAINNYA - ASSET TAK BERWALID																															
ASSET LAINNYA - ASSET LAIN - LAIN		8.000.003.848,00																													
Jumlah		3.000.003.848,00																													
KETERANGAN UNTUK BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI																															
BESAN PERUSAHAAN																															
BESAN JASA																															
BESAN PERUSAHAAN																															
BESAN LAIN-LAIN																															
Jumlah																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															
KETERANGAN																															

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN DAFTAR ASET LAINNYA
31 DECEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL 01-Jan-2024	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 31-Dec-2024
1	2	3	4	5	6 = (3+ 4 - 5)
	ASET TIDAK BERWUJUD				
1	Software	145.500.000,00	0,00	0,00	145.500.000,00
2	ISO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Berwujud	145.500.000,00	0,00	0,00	145.500.000,00
	ASET LAIN- LAIN	3.508.083.848,00			
	Jumlah Aset lain - lain	3.508.083.848,00	0,00	0,00	3.508.083.848,00
	TOTAL	3.653.583.848,00	0,00	0,00	3.653.583.848,00

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAINNYA
31 DESEMBER 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian Daerah

No	Keterangan	Saldo Awal 2024	Realisasi Belanja Modal TA 2024 yang tidak di Kaptalisasi (Tidak menjadi Aset Jangka Panjang)	Belanja Modal TA 2024 yang tidak di Kaptalisasi (Tidak menjadi Aset Jangka Panjang)	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang			Aset Lainnya DBO BTT	Jumlah	Aset Lainnya DBO BTT	Jumlah	Saldo Akhir per 31 Des 2024	Amortisasi s.d 31 Des 2024	(Dalam Rupiah)
					Penerimaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk OPD)	Kapitalisasi dari Belanja Barang Aset	Koreksi Pencatatan	Penerimaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk OPD)	Koreksi Pencatatan	Penerimaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk OPD)							
1	ASET TAK BERWUJUD																
1	Goodwill	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
2	Lisensi dan Franchise	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
3	Nilai Cipta	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
4	Nilai Paten	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
5	Software	145.500.000,00	0,00	0,00								0,00		0,00	145.500.000,00		0,00
6	Kujalan	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengembangan	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
Jumlah Aset Tak Berwujud		145.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.000,00		0,00
Aset Lain - Lain		3.000.000.000,00													3.000.000.000,00		0,00
Aset Lain - Lain		3.000.000.000,00	0,00	0,00								0,00		0,00	3.000.000.000,00		0,00
KETERANGAN UNTUK BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPITALISASI																	
BEBAN JASA				0,00								0,00		0,00	0,00		0,00
JUMLAH		3.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00		0,00

MENGETAHUI
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
NIP. 19760612 199603 1 005

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

ENNY RUSTINI, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD
31 DESEMBER 2024

NAMA PERANGKAT DAERAH : Badan Kepegawaian Daerah

No	Kode Akun LRA	Uraian	Tanggal Perolehan	Nilai Perolehan	Umur Ekonomis (Bulan)	Nilai Amortisasi per Bulan	Lama/Umur Penggunaan Per 31-Des-2024	Nilai/Beban Amortisasi Tahun 2024	Nilai Amortisasi s/d Tahun 2023	Nilai Amortisasi s/d Tahun 2024	Nilai Buku per 31-Des-2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) : (5)	(7) = (N atau tahun berjalan) - (3) + 1	(8) = (6) atau (8) = 0	(9) = (5) x (6) atau (9) = (7) x (6)	(9) = (5) x (6) atau (9) = (7) x (6)	(10) = (4) - (9)
		Aset Tidak Berwujud									
1	5.2.05.08.01.0001	Goodwill				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5.2.05.08.01.0002	Lisensi dan Franchise				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5.2.05.08.01.0003	Hak Cipta				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
4	5.2.05.08.01.0004	Hak Paten				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5.2.05.08.01.0005	Software	31-Des-14	145.500.000,00	48	3.031.250,00	120	0,00	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00
6	5.2.05.08.01.0006	Kajian				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
7	5.2.05.08.01.0007	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
8	5.2.05.08.01.0008	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5.2.05.08.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya				0,00	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah		145.500.000,0000		3.031.250,0000		-	145.500.000,0000	145.500.000,0000	-

KEPALA BAGIAN SUB TATA USAHA

ENNY RUSTINI, SE., MM
NIP. 19711112 200112 2 001

[illegible]

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
 Periode 31 Desember 2024
 Badan Kepegawaian Daerah

NO	Koding PDD	Nama Akun PDD	URAIAN	Nomor Perjanjian (Kontrak)	Tanggal Perjanjian (Kontrak)	Nilai Realisasi Penyerimaan LRA	Jangka Waktu (bulan)	Nilai Amortisasi per Bulan	Tahun awal perjanjian			Tahun berakhir perjanjian			Akumulasi Amortisasi PDD sd 31 Des 2023	Akumulasi Pendapatan Amortisasi PDD sd 31 Des 2024	Pendapatan 1 Jan 31 Des 2024 (LO)	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Des 2024 (Versus)	Link Build Dokumen				
									Tanggal	Bulan	Tahun	Tanggal	Bulan	Tahun									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
a	Badan Kepegawaian Daerah		SERWATM DAN KANTOR RAS BB	53/PEM.04.04.01/BP/AD 0637/UBA-KSU/2022	09/09/2022	297.890.000,00	60	4.964.833,33	23	11	2021	23	11	2026	124.120.834,00	183.698.834,00	59.578.000,00	114.191.168,00					
Jumlah																		124.120.834,00	183.698.834,00	59.578.000,00	114.191.168,00		

[illegible]

5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakian Dinas Lapangan (PDL)	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0064	Belanja Pakian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373.350,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakian Sipi Resmi (PSR)	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0065	Belanja Pakian Sipi Resmi (PSR)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakian Dinas Upacara (PDU)	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0066	Belanja Pakian Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakian Penyelamatan	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0067	Belanja Pakian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakian Siga	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0068	Belanja Pakian Siga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakian Teknik	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0069	Belanja Pakian Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakian Pelatihan Kerja	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0070	Belanja Pakian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0071	Belanja Pakian Kerja Laboratorium	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0071	Belanja Pakian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakian Kerja Bengkel	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0072	Belanja Pakian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakian KOPRI	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0073	Belanja Pakian KOPRI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakian Adat Daerah	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0074	Belanja Pakian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakian Batik Tradisional	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0075	Belanja Pakian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakian Olahraga	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0076	Belanja Pakian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	503.948.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakian Pasdikbra	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0077	Belanja Pakian Pasdikbra	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakian Jas/Safari	1.1.12.01.03.0009	Perengkapan Dinas	8.1.02.01.01.0078	Belanja Pakian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0001	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baja	8.1.02.01.02.0001	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Baja	8.1.02.01.02.0002	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	1.1.12.02.01.0003	Komponen Jembatan Pratekan	8.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Jembatan Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu-Rambu	8.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	1.1.12.02.01.0005	Attachment	8.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0006	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tumpul (DCT)	1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tumpul (DCT)	8.1.02.01.02.0006	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tumpul (DCT)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	1.1.12.02.02.0002	Pipa Asbes Semen (ACP)	8.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0008	Belanja Pipa-Pipa Baja	1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	8.1.02.01.02.0008	Belanja Pipa-Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	8.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	1.1.12.02.02.0005	Pipa Beton Pratekan	8.1.02.01.02.0010	Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	1.1.12.02.02.0006	Pipa Fiber Glass	8.1.02.01.02.0011	Belanja Pipa-Pipa Fiber Glass	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.1.12.02.02.0007	Pipa Plastik Pvc (Upvc)	8.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.02.0013	P I P A Lainnya	1.1.12.02.02.0007	P I P A Lainnya	8.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.03.0001	Belanja Barang Bekas Dangkal	1.1.12.03.01.0001	KOMPONEN BEKAS DANGAL	8.1.02.01.03.0001	Belanja Barang Bekas Dangkal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.03.0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Kom	1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	8.1.02.01.03.0002	Belanja Komponen Bekas dan Pipa Bekas-Komponen Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.01.03.0003	Belanja Pipa-Pipa dan Pipa Bekas-Kom	1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	8.1.02.01.03.0003	Belanja Pipa-Pipa dan Pipa Bekas-Komponen Bekas dan Pipa Bekas	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	5.1.02.05.01.0001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	8.1.02.05.01.0001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	447.187.500,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	5.1.02.05.01.0002	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	8.1.02.05.01.0002	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	0,00	0,00	0,00	0,00	447.187.500,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.1.02.05.01.0003	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	8.1.02.05.01.0003	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	447.187.500,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Beasiswa	5.1.02.05.01.0004	Belanja Beasiswa	8.1.02.05.01.0004	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0005	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	5.1.02.05.01.0005	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	8.1.02.05.01.0005	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0006	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKD)	5.1.02.05.01.0006	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKD)	8.1.02.05.01.0006	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0007	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pert	5.1.02.05.01.0007	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pert	8.1.02.05.01.0007	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0008	Belanja Santunan Kematian	5.1.02.05.01.0008	Belanja Santunan Kematian	8.1.02.05.01.0008	Belanja Santunan Kematian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau RW	5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau RW	8.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau RW	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0010	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau RT	5.1.02.05.01.0010	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau RT	8.1.02.05.01.0010	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau RT	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	8.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Karang Taruna	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga	5.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga	8.1.02.05.01.0012	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0013	Belanja Uang yang Diberikan kepada Poyenda	5.1.02.05.01.0013	Belanja Uang yang Diberikan kepada Poyenda	8.1.02.05.01.0013	Belanja Uang yang Diberikan kepada Poyenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.01.0014	Belanja Imbal Jasa Penjaminan	5.1.02.05.01.0014	Belanja Imbal Jasa Penjaminan	8.1.02.05.01.0014	Belanja Imbal Jasa Penjaminan	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
31 DESEMBER 2024

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

URAIAN	BEBAN TAHUN 2024	BEBAN TAHUN 2023
1	2	3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
A.1 BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.546.593.314	1.531.010.746
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	349.443.101	118.480.811
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.292.088	10.292.088
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.836.946	6.694.404
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0
Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	0	0
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0	0
Beban Penyusutan Properti Investasi	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	1.912.165.449	1.666.478.049
A.2. BEBAN AMORTISASI		
Beban Amortisasi	0	0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	1.912.165.449	1.666.478.049
B. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0	0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0	0
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	0	0
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0	0
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
Beban Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0	0
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0	0

MENGETAHUI
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si
 NIP. 19760612 199603 1 005

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


ENNY RUSTINI, SE., MM
 NIP. 19711112 200112 2 001

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Badan Kepegawaian Daerah
PER 31 Desember 2024

NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	1.414.193.735,00	1.568.885.042,00	(154.691.307,00)	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.901.665.210,00	4.707.817.300,00	193.847.910,00	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
JUMLAH		6.315.858.945,00	6.276.702.342,00	39.156.603,00	

Mengetahui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. DEDI SUPANDI, S.STP., M.Si

NIP. 19760612 199603 1 005

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



ENNY RUSTINI, SE., MM

NIP. 19711112 200112 2 001

LAMPIRAN UTANG BELANJA
PER 31 DECEMBER 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Lampiran 20

NO	Kode Risk UTANG BELANJA	NAMA REKENING UTANG BELANJA	URAIAN	SALDO AWAL (KEWAJIBAN PER 31 Desember 2023)		Koreksi Kurang		Koreksi Tambah		SALDO AWAL 2024 SETELAH KOREKSI		MUTASI KURANG (KEWAJIBAN PER 31 Dec 2023 YANG DIBAYAR DI T.A. 2024)		MUTASI TAMBAH (KEWAJIBAN TAHUN 2024 YANG BELUM DIBAYAR PER 31 Dec 2024)		KEWAJIBAN PER 31 Dec 2024
				NO DOKUMEN	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	NILAI (Rp)	7-(4-5+6)	9	NO SP2D/SPJ	NO DOKUMEN	NO DOKUMEN	NILAI (Rp)	
1		2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					35.286.453,00	-	100,00			35.286.553,00						35.748.141,00
	2.1.06.02.02.0059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon			2.933.274,00					2.933.274,00			002/08.02/1 - 011/08.02/1	2.923.210		2.923.210,00
	2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air			44.236,00					44.236,00			012/08.02/1	91.250		91.250,00
	2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik			32.308.943,00					32.308.943,00			013/08.02/1 - 017/08.02/1	32.733.681		32.733.681,00
		Utang Belanja Jasa Jamahan Kesehatan ASN- Jasa Jamahan Kesehatan PNS					100,00			100,00						
		JUMLAH			35.286.453,00	-	100,00			35.286.553,00						35.748.141,00